CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PE N D A H U L U A N

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
t. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
u. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
v. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
w. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

x. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019;

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

a. Belanja Daerah

4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

a. Aset

b. Kewajiban

c. Ekuitas

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Beban

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

4.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sebagai berikut :

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang meliputi belanja langsung. Belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan–Belanja Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.215.000.000	902.835.414	74,31	312.164.586
2	Belanja Modal	0	0	0	0
	Jumlah Belanja	**1.215.000.000**	**902.835.414**	**74,31**	**312.164.586**

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 - 2019

Belanja	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Pegawai	612.588.763	553.730.135	106.166.000	166.456.500	81.251.500
Belanja Barang	705.068.692	1.021.360.150	713.002.366	831.207.428	821.583.914
Belanja Modal	0	49.198.450	0	0	0
Jumlah	**1.317.657.455**	**1.624.288.735**	**819.168.366**	**997.663.928**	**902.835.414**
% Kenaikan	31,48 %	44,42%	10,21 %	21,79%	9,51%

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi belanja operasi tahun 2019 sebesar Rp. 902.835.414,- turun sebesar 9,51% dari tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 naik sebesar 31,48% , Tahun 2016 naik sebesar 44,42% dan di tahun 2017 turun

10,21%. Ditahun 2016 ada belanja modal aset lainnya berupa hasil kajian/Pengembangan di Kegiatan Penataan Kelembagaan dengan anggaran Rp. 50.000.000,- dengan realisasi Rp. 49.198.450,- (98,40%). Beberapa hal yang memicu kenaikan dan penurunan anggaran dan realisasi belanja operasional belanja barang yang disebabkan Adanya perubahan arah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang yang lebih memprioritaskan kebijakan yang lebih strategis untuk masyarakat.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

Program 1	**: PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		
Kegiatan 1	**: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	39.410.000	38.660.000	
- Belanja Barang & Jasa	331.641.900	274.519.534	
- Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan 1	**371.051.900**	**313.179.534**	
Program 2	**: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		
Kegiatan 1	**: Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	0	0	
Belanja Barang & Jasa	89.725.000	58.526.146	
Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan 1	**89.725.000**	**58.526.146**	
Program 3	**REFORMASI BIROKRASI**		
Kegiatan 1	**: Standarisasi Kinerja**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	15.880.000	15.419.000	
Belanja Barang & Jasa	224.646.000	191.191.417	
Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan 1	**754.223.100**	**531.129.734**	
Kegiatan 2	**: Kelembagaan**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	11.280.000	8.662.500	
Belanja Barang & Jasa	188.102.100	104.532.082	
Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan 2	**199.382.100**	**113.194.582**	

Kegiatan 3	**: Tata Laksana**		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	29.800.000	18.510.000	
Belanja Barang & Jasa	284.515.000	192.814.735	
Belanja Modal	0	0	
Jumlah Kegiatan 3	**314.315.000**	**211.324.735**	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang selam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3. Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2015 s.d. 2019

Posisi Keuangan	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
1. Aset	330.549.748	339.258.815	(2.604.129.826,08)	182.230.356,00	127.652.344,50
2.Kewajiban	1.107.540	1.338.200	685.504	3.129.306,00	1.479.964,00
3 Ekuitas	(1.106.251.3074)	(1.338.988.120)	(3.500.866.556,08)	(179.101.050,00)	(126.172.380,50)
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	**330.549.748**	**339.258.815**	**(2.604.129.826,08)**	**182.230.356,00**	**127.652.344,50**

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Bebarapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

a. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan, sehingga penerapan *" the right man on the right job"* belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/propinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenangannya.

b. Masalah Sarana dan Prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan pada setiap bidang pemerintahan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya pemerintah kabupaten lumajang berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja,

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
1) Belanja Operasi	**1.215.000.000**	**902.835.414**	**997.663.928**

Belanja operasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 1. Realisasi Belanja Operasi tahun 2019 dan 2018

No	Belanja Operasi	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Pegawai	96.370.000	81.251.500	84,31	166.456.500
2	Belanja Barang dan Jasa	1.118.630.000	821.583.914	73,45	831.207.428
	Jumlah	**1.215.000.000**	**902.835.414**	**74,31**	**997.663.928**

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	**96.370.000**	**81.251.500**	**166.456.500**

Belanja pegawai meliputi belanja langsung, belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang.
Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 2. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2019

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	BELANJA LANGSUNG				

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Honorarium Pengadaan barang/jasa	3.950.000	3.600.000	91,14	1.500.000
2	Honorarium Penangung jawab Pengelola Keuangan	0	0	0	38.035.000
3	Honorarium Pengurus Barang	900.000	675.000	75,00	900.000
4	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	1.980.000	1.815.000	91,67	3.600.000
5	Honorarium Pengguna Anggaran	4.500.000	4.500.000	100	0
6	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6.120.000	6.120.000	100	0
7	Honorarium Tim Teknis Kegiatan	0	0	0	68.200.000
8	Honorarium Tim Otonomi Daerah	0	0	0	0
9	Uang lembur Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	21.960.000	21.950.000	99,95	34.359.500
10	Uang lembur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja	0	0	0	795.000
11	Uang lembur Kegiatan Penataan Kelembagaan	0	0	0	3.334.000
12	Uang lembur Kegiatan Standarisasi Kinerja	11.980.000	11.644.000	97,20	0
13	Uang lembur Kegiatan Fasilitasi	0	0	0	2.270.000

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	Penelitian Perjanjian Kinerja				
14	Uang lembur Kegiatan Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	0	0	0	1.294.000
15	Uang lembur Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Dalam Rangka Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Publik	0	0	0	3.290.000
16	Uang lembur Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja	0	0	0	5.328.000
17	Uang lembur Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja	0	0	0	3.551.000
18	Uang lembur Kegiatan Kelembagaan	7.680.000	7.462.500	97,17	0
19	Uang lembur Tata Laksana	15.400.000	4.610.000	29,94	0
20	Honorariu PPTK Kegiatan Standarisasi Kinerja	3.900.000	3.775.000	96,79	0
21	Honorariu PPTK Kegiatan Kelembagaan	3.600.000	1.200.000	33,33	0
22	Honorariu PPTK Kegiatan Standarisasi Kinerja	14.400.000	13.900.000	96,53	0
	Jumlah Belanja	**96.370.000**	**81.251.500**	**84,31**	**166.456.500**

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	Pegawai Langsung				

	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	**1.118.630.000**	**821.583.914**	**831.207.428**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 3. Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2019

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0	0	0	2.700.000
2	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	720.000	561.200	77,94	0
3	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	687.500	682.465	99,27	2.469.700
4	Bahan Makanan	1.012.000	1.010.400	99,84	0
5	Belanja Telepon	1.800.000	971.116	53,95	1.620.098
6	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.740.000	1.659.800	95,39	1.620.000
7	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.137.600	6.897.532	96,64	6.703.171
8	Belanja Dekorasi	24.200.000	16.482.000	68,11	140.000
9	Belanja Premi	950.400	892.570	93,92	675.737

	Asuransi Ketenagakerjaan				
10	Belanja Penggandaan/Foto Copy/Penjilidan/Penyampulan	32.729.700	32.524.800	99,37	22.531.700
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	149.535.000	147.911.000	98,91	196.717.500
12	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.195.000	6.127.450	98,91	5.987.503
13	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.600.000	5.600.000	100	4.200.000
14	Belanja Pakaian Olah Raga	1.000.000	1.000.000	100	3.500.000
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.600.000	62.775.000	42,16	22.962.500
16	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	359.487.800	267.601.272	74,44	367.137.827
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000	0	0	0
18	Belanja Upah/ongkos Tenaga Kerja Bulanan	158.400.000	150.300.000	94,89	70.800.000
19	Belanja Tambahan Upah/Ongkos Tenaga Kerja Bulanan	44.500.000	27.735.000	62,33	38.212.500
20	Belanja Office Use	690.000	450.000	65,22	0
21	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	47.300.000	24.303.181	51,38	29.368.692

22	Belanja Jasa Servis dan Penggamti suku Cadang	4.425.000	2.797.965	63,23	4.276.500
24	Belanja Pemeliharaan Personal Komputer	12.450.000	11.335.000	91,04	9.940.000
25	Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer	7.550.000	5.090.000	67,42	4.750.000
26	Belanja Cinderamata	2.660.000	1.567.500	58,93	0
27	Belanja Paket/Pengiriman	0	0		9.000
28	Belanja Pengganti Transport	67.250.000	4.690.719	3,41	7.250.000
29	Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga ahli	88.100.000	37.400.000	42,45	26.125.000
30	Belanja Jasa pendukung kegiatan	6.100.000	2.850.000	46,72	1.300.000
	Belanja cetak	810.000	367.944	45,43	0
31	Belanja Sewa meja dan kursi	0	0	0	210.000
	Jumlah	**1.118.630.000**	**821.583.914**		**831.207.428**

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; Alat Tulis Kantor, Barang-barang cetakan, alat-alat listrik dan elektronik, Perangko, materai dan benda pos dan Peralatan kebersihan/bahan pembersih. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 13.355.387 untuk Persediaan Barang Pakai Habis dari Bagian Umum Setda Kab. Lumajang, Rp. 387.000 dari persediaan Barang Pakai Habis sisa dari tahun 2018, dan Rp. 197.352.759 Persediaan Barang Pakai Habis dari Penggandaan Bagian Organisasi Setda kab. Lumajang, terinci sebagai berikut.

Tabel 4. Realisasi Belanja Persediaan tahun 2019

1. Persediaan Barang Pakai Habis dari Bagian Umum Setda Kabupaten Lumajang

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Persediaan alat tulis kantor	48.436.472	9.971.737
2	Persediaan Barang-barang Cetakan	3.017.475	3.383.650
	Jumlah	**51.453.947**	**13.355.387**

2. Persediaan Barang Pakai Habis Penggandaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang sisa dari tahun 2018.

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Persediaan Perangko, materai dan benda pos	1.503.000,00	387.000,00
	Jumlah	**1.503.000,00**	**387.000,00**

3. Persediaan Barang Pakai Habis Penggandaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Persediaan Alat-alat Listrik dan Elektronik	720.000,00	561.200,00
2	Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	687.500	682.465
3	Persediaan Bahan Makanan Pokok	2.262.000,00	1.010.400,00
4	Persediaan Barang Cetakan	810.000,00	367.944,00
5	Persediaan Barang Penggandaan	32.729.700,00	32.524.800,00
6	Persediaan Makanan dan minuman rapat	149.535.000,00	147.911.000,00
7	Persediaan Makanan dan minuman tamu	6.195.000,00	6.127.450,00
8	Persediaan Pakaian Batik Tradisional	5.600.000,00	5.600.000,00
9	Persediaan Pakaian Olah Raga	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Persediaan Souvenir/Cinderamata	2.660.000,00	1.567.500,00
	Jumlah	**208.679.200,00**	**197.352.759,00**

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 144.465.506, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2019

No	Belanja jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019
1	Belanja telepon	2.400.000	1.620.098
3	Belanja surat kabar/majalah	1.620.000	1.620.000
4	Belanja kawat/faksimili/internet	8.640.000	6.703.171
5	Belanja paket/pengiriman	300.000	9.000
6	Belanja dekorasi	637.500	140.000
7	Belanja penggantian transport	7.750.000	7.250.000
8	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	58.700.000	26.125.000
9	Belanja jasa pendukung kegiatan	3.600.000	1.300.000
11	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	767.340	675.737
12	Belanja sewa meja dan kursi	900.000	210.000
13	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	69.600.000	60.600.000
14	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	43.560.000	38.212.500
	Jumlah	**198.474.840**	**144.465.506**

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 58.526.146,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 6. : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2019

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2019	Realisasi 2019
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	47.300.000	24.303.181
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	4.425.000	2.797.965
3	Belanja Pemeliharaan Personal Komputer	12.450.000	11.335.000
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer	7.550.000	5.090.000
	Jumlah	**71.725.000**	**43.526.146**

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 330.376.272 terinci sebagai berikut.

Tabel 7. : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2019

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2019	Realisasi
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.600.000	62.775.000
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	359.487.800	267.601.272
	Jumlah	**435.087.800**	**330.376.272**

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. : Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2019

1. Saldo 31 Desember 2019		0
2. Peneriman :		
-SP2D UP	90.000.000	
-SP2D TUP	0	
-SP2D GU	902.835.414	
-Penerimaan PFK	0	
Jumlah Penerimaan		992.835.414
3. Pengeluaran :		
-SPJ UP/GU	894.835.414	
-SPJ GU Nihil	49.195.297	
-Setor kembali sisa TUP	0	

-Setor kembali sisa UP/GU	48.804.703	
-Pengeluaran PFK	0	
-Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0	
Jumlah pengeluaran		992.835.414
4. Saldo 31 Desember 2019		0

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
b) Persediaan	**14.396.067**	**20.090.401**

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 9. Daftar Persediaan Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Persediaan	2019	2018
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	9.971.737	15.225.676
2	Persediaan Barang cetakan	3.383.650	2.259.225
3	Persediaan Alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	258.100	0
4	Persediaan Kebersihan/bahan Pembersih	395.580	1.102.500
5	Persediaan Perangko	387.000	1.503.000
	Jumlah	**14.396.067**	**20.090.401**

a. ASET TETAP

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Aset Tetap	**60.457.587,50**	**99.501.575,00**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi

dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 10. Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peralatan dan Mesin	278.450.000	0	0	0	278.450.000
2	Alat Kantor san Rumah Tangga	392.731.520	0	0	0	392.731.520
3	Alat Studio dan Komunikasi	2.100.000	0	0	0	2.100.000
4	Aset Tetap Lainnya	8.900.00	0	0	0	8.900.00
	Jumlah	**682.181.520**	**0**	**0**	**0**	**682.181.520**

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	**673.281.520**	**673.281.520**

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 673.281.520,00 dan Rp. 673.281.520,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 11. Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2019
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	278.450.000	0	0	0	278.450.000
2	Mesin Tik	52.645.000	0	0	0	52.645.000
3	Meja Gambar	62.492.000	0	0	0	62.492.000
4	Komputer mainframe/server	232.905.800	0	0	0	232.905.800
5	Meja Kerja	15.115.000	0	0	0	15.115.000
6	Lampu hias	4.368.720	0	0	0	4.368.720
7	Kamera	25.205.000	0	0	0	25.205.000
8	Telephone	2.100.000	0	0	0	2.100.000
	Jumlah	**673.281.520**	**0**	**0**	**0**	**673.281.520**

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
(c) Aset Tetap Lainnya	**8.900.000**	**8.900.000**

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 8.900.000 dan Rp. 8.900.000 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 12. Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2018	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2019
1	Buku dan Pepustakaan	8.900.000	0	0	0	8.900.000
	Jumlah	8.900.000	0	0	0	8.900.000

b. ASET LAINNYA

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Aset Lainnya	**51.859.000**	**51.859.000**

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 51.859.000 terdiri dari Aset tetap lainnya Rp. 8.900.000 dan Aset Lain-lain Rp. 42.959.000. sedangkan saldo Per 31 Desember 2018 tidak ada perubahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13. Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2018

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2019
1	Aset Tetap Lainnya	8.900.000	0	0	8.900.000
2	Aset Lain lain	42.959.000	0	0	42.959.000
	Jumlah	**51.859.000**	**0**	**0**	**51.859.000**

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
2) Aset Tak Berwujud	**98.898.450**	**98.898.450**

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 98.898.450 sedangkan saldo Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 98.898.450 terinci sebagai berikut :

Tabel 14. Daftar Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2018	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2019
1	Aset Tak Berwujud	98.898.450	0	0	98.898.450
	Jumlah	**98.898.450**	**0**	**0**	**98.898.450**

c. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 685.504 dan Rp. 685.504 diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2018 (Rp)	**31 Desember 2019 (Rp)**
(a) Utang Belanja	**3.129.306**	**1.479.964**

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp. 1.479.964 terdiri dari utang belanja jasa telepon Rp. 59.653,00 Internet Rp. 627.000,00 utang perjalanan dinas Rp. 400.000,00 dan utang Bahan bakar minyak dan pelumas Rp. 393.311,00.

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.479.964,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian telepon, internet, perjalanan dinas dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 15. Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2019

No	Jenis Utang	31 Des 2019	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	31 Des 2019
1	Utang Jasa telepon	59.653	0	0	59.653
2	Utang Jasa internet	627.000	0	0	627.000
3	Utang Perjalanan	400.000	0	0	400.000

	Dinas Dalam Daerah				
4	Bahan bakar Minyak dan Pelumas	393.311	0	0	393.311
	Jumlah	**1.479.964**	**0**	**0**	**1.479.964**

d. EKUITAS

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Ekuitas	**(823.749.335,50)**	**(888.263.903,00)**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 16. Daftar Rincian Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Jumlah Ekuitas Awal	179.101.050,00	(179.101.050,00)
2	Surplus/Defisit LO	(1.002.850.385,50)	0
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	0	0
4	Koreksi Nilai Persediaan	0	0
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
6	Lain-lain	0	0
7	RK PPKD	0	0
8	Ekuitas (1(2) Akhir	(823.749.335,50)	(179.101.050,00)

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Beban Barang dan Jasa-LO	**872.715.208**	**880.665.204**

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 17. Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Beban Pegawai	166.456.500,00	81.251.500,00
2	Beban Jasa	880.665.204,00	872.715.208,00
3	Beban Penyusutan	59.857.252,50	48.883.677,50
	Jumlah	**1.106.978.956,50**	**1.002.850.385,50**

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
2) Beban Penyusutan dan Amortisasi	**48.883.677,50**	**59.857.252,50**

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 48.883.677,50 dan Rp. 59.857.252,50 sebagai berikut.

Tabel 18. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.043.987,50	50.017.562,50
2	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	39.043.987,50	50.017.562,50
1	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	9.839.690,00	9.940.000,00
	Jumlah	**48.883.677,50**	**59.857.252,50**

d. Surplus (Defisit) LO

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	**(1.002.850.385,50)**	**0**

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 19. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2019	2018
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(1.002.850.385,50)	0
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0	0
	Jumlah	**(1.002.850.385,50)**	**0**

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
a. Ekuitas	**(823.749.335,50)**	**(179.101.050,00)**

Saldo ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp (823.749.335,50) merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2019. Sedangkan ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp. (179.101.050,00) merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2018 *audited.*

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	**(1.002.850.385,50)**	**0**

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, sebagai berikut.

Tabel 20. Surplus/Defisit LO

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Pendapatan LO	0	0
2	Beban	1.002.850.385,50	179.101.050,00
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	(1.002.850.385,50)	0
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	0	0
5	Pos Luar Biasa	0	0
6	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	(1.002.850.385,50)	(179.101.050,00)

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BAGIAN ORGANISASI SETDA

Bahwa dengan dicanangkannya Jawa Timur sebagai pelayanan percontohan utamanya pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat, Bagian Organisasi Setda Lumajang diharapkan mampu memfasilitasinya, sehingga tidak hanya kegiatan rutin seperti Tata Naskah, Pelayanan Publik, Kelembagaan, peningkatan kinerja Aparatur dan Analisa Jabatan yang ditangani serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena Aparatur Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang administrasi maupun aparatur.

Dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan dibidang aparatur, khususnya Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah , bahwa Susunan Organisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang meliputi :

1. Sub Bagian Kelembagaan ;
2. Sub Bagian Standarisasi Kinerja ;
3. Sub Bagian Tata Laksana .

Untuk pemantapan Otonomi Daerah dan Implikasi Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan karakteristik, potensi kebutuhan Daerah yang mencakup upaya pengintegrasian dan pengsinkronisasian penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, maka Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian dan membina pelaksanaan program tata naskah, standar pelayanan minimal, prosedur kerja, pelayanan publik, analisa kelembagaan, jabatan dan standarisasi kinerja.

Dasar Hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Hukum 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini.

Kemudian sajikan nama pejabat yang ada di dalam struktur tersebut, sebagai berikut :

1. Kepala Bagian : Drs. Arif Sukamdi
2. Kasubag. Kelembagaan : Vidia Prayuasmi, S.STP
3. Kasubag. Standarisasi Kinerja : Aksanul Inam, S.Sos
4. Kasubag. Tata Laksana : -

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

3.1. Tugas Pokok.

Tugas Pokok Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang adalah membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian dan membina pelaksanaan program tata naskah, standar pelayanan minimal, prosedur kerja, pelayanan publik, analisa kelembagaan, jabatan dan standarisasi kinerja.

3.2. Fungsi.

1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang, mempunyai fungsi :
   a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Organisasi ;
   b. Pengkoordinasian rencana operasional pelaksanaan program kerja Tata Naskah, SPM, Prosedur Kerja, Pelayanan Publik, Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Standarisasi Kinerja ;
   c. Pembinaan teknis pelaksanaan program kerja Tata Naskah, SPM, Prosedur Kerja, Pelayanan Publik, Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Standarisasi Kinerja dan Pelaksanaan kinerjanya ;

d. Pengkoordinasian secara hirarkhi dan vertikal tentang tugas Bagian Organisasi ;
e. Penelaahan konsep-konsep Naskah Dinas tentang Tata Naskah Dinas, SPM, Prosedur Kerja, Pelayanan Publik, Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Standarisasi Kinerja ;
f. Penganalisaan produk – produk hukum tentang organisasi dan manajemen ;
g. Pengevaluasian dan menginventarisasi permasalahan bidang organisasi dan manajemen;
h. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis organisasi dan manajemen untuk jangka pendek, menengah dan panjang ;
i. Pengajuan telaahan staf tentang organisasi dan manajemen ;
j. Penyelenggaraan analisa organisasi dan manajemen serta analisa jabatan ;
k. Penyusunan hasil analisa dan kompetensi jabatan ;
l. Pemberian pelayanan administrasi kelembagaan, tata naskah dan standarisasi kinerja;
m. Penyusunan Petunjuk Teknis atau Peraturan Perundang-undangan tentang organisasi manajemen ;
n. Pelaksanaan pembuatan konsep Raperda dan Tata Kerja Organisasi;
o. Penyediaan Peraturan Perundangan berkaitan dengan organisasi Perangkat Daerah dan manajemennya ;
p. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang ;
q. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi ;
r. Pelaksanaan operasional adminstrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah serta Asisten Adminstrasi.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang didukung oleh SDM sebanyak 15 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIP.	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Drs. Arif Sukamdi	19720204 199101 1 001	Kepala Bagian	S1 Ilmu Pemerintahan	
2	Aksanul Inam, S.Sos	19830807 201001 1 016	Kasubag. Standarisasi Kinerja	S1 Sosiologi	
3	Vidia Prayuasmi, S.STP	19910926 201206 2 002	Kasubag. Kelembagaan	D IV Pembangunan	

				dan Pemberdayaan	
4	Yoga Noer Ichsan, S.STP	19941019 201609 1 003	Analis Laporan Standarisasi Kinerja	D IV Politik Pemerintahan	
5	Fiqqi Fadlilah, S.Psi	19950410 201903 1 010	Analis Jabatan	S1 Psikologi	
6	Inne Rindahsari	19831130 201001 2 021	Pengadministrasian Umum	S1 Ekonomi	
7	Efendy Agung W	19800529 201406 1 001	Pengadministrasian Umum	SMA	
8	Febri Niamatul Mufidah	PTT	Staf	S1 Akuntansi	
9	Yenny Herawati	PTT	Staf	DIII Ekonomi	
10	Khoirul Hamzah	PTT	Staf	SMA	
11	Abdillah Ibrahim Soleh	PTT	Staf	S1 Ekonomi	
12	Bryan Aji Wibowo	PTT	Staf	SMK	
13	Diana Ismaniasih	PTT	Staf	D II Akuntansi	
14	Ressa Bella Safira	PTT	Staf	D III	
15.	M. Eko Cahyono	PTT	Staf	S1	

5. VISI DAN MISI

1. Visi

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

2. Misi

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata ;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri ;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih *(good and clean governance)* yang berbasis teknologi informasi.

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang tahun 2019 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity).
2. Disampaing sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
   a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
   b) Semua aset / sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang
   c) Kewajiban-kewajiban Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
   d) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Laporan keuangan pokok Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri dari laporan realisasi anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD ; neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Bagian Organisasi Setda pada tanggal 31 Desember 2019 ; serta catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas ketiga laporan keuangan terdahulu yaitu laporan realisasi anggaran dan neraca
4. Dari laporan realisasi anggaran diperoleh infomasi sebagai berikut :
   (1) Dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.215.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 902.835.414,- atau 74,31% dari anggaran.
5. Dari laporan Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :
   (1) Total aset Bagian Organisasi Setda pada tahun 2019 sebesar Rp. 682.181.520,-
   Terdiri dari :
   Aset Tetap : Rp. 673.281.520,-
   Aset Tetap Lainnya : Rp. 8.900.000,-
   (2) Aset Tak Berwujud : Rp. 98.898.450,-
   (3) Aset Lainnya : Rp. 42.959.000,-
   (4) Kewajiban dan Ekuitas dana sebesar Rp. 127.652.344,50